

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa dan kelurahan merupakan ujung terdepan wilayah yang bersentuhan dengan masyarakat. Kemajuan masyarakat desa dan kelurahan menjadi kemajuan bagi suatu desa atau kelurahan. Untuk itu perlu secara terus menerus dipikirkan dan selanjutnya direalisasikan bagaimana agar desa dan kelurahan dapat maju, baik dari aspek ekonomi, administrasi, maupun partisipasi masyarakatnya. Upaya desa dan kelurahan untuk maju, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga aparatur desa dan kelurahan serta masyarakat dan mitra-mitra yang terlibat. Aparatur desa dan kelurahan perlu memberikan dorongan atau stimulus bagi pengembangan kegiatan usaha wilayahnya.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, terhitung tahun 2015-2017 angka kemiskinan di Indonesia memperlihatkan penurunan yang signifikan. Meskipun demikian, diperkirakan penurunan ini akan melambat di masa depan. Mereka yang dalam beberapa tahun terakhir ini mampu keluar dari kemiskinan adalah mereka yang hidup di ujung garis kemiskinan yang berarti tidak diperlukan sokongan yang kuat untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Untuk itu perlu adanya solusi yang dilakukan oleh negara kita agar rakyatnya dapat keluar dari masalah kemiskinan tersebut.

Secara umum kemiskinan diartikan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok atau dasar. Mereka yang dikatakan berada di garis kemiskinan adalah apabila tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok.

Kemiskinan merupakan masalah global yang sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihat dari segi moral dan evaluatif, dan ada pula yang memahaminya dari sudut imiah yang telah mapan. Istilah “negara berkembang” biasanya digunakan untuk negara-negara yang miskin.

Kemiskinan merupakan permasalahan dalam pembangunan yang harus dihadapi oleh wilayah-wilayah yang sudah maju maupun yang kurang maju. Kemiskinan umumnya ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan dan keterpurukan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas dalam akses sarana dan prasarana, modal dan kegiatan sosial ekonomi lainnya, sehingga tertinggal jauh dari masyarakat yang memiliki potensi yang lebih tinggi.

Kondisi seperti ini umumnya akan memunculkan permasalahan-permasalahan baru, yang diantaranya adalah tingginya tingkat kriminalitas, dekadensi moral dan etika, produktivitas dan kreatifitas yang rendah dan permasalahan sosial lainnya akibat beratnya beban ekonomi masyarakat. Selain

itu kemiskinan akan menghambat pembangunan wilayah, pemerataan pembangunan dan demokrasi ekonomi. Oleh karena itu pengentasan kemiskinan perlu dijadikan prioritas utama dalam pembangunan suatu daerah

Membangun pengertian kemiskinan bukanlah perkara yang mudah karena kemiskinan mencakup berbagai macam dimensi. Kemiskinan secara ekonomi dapat diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Dalam bukunya Totok Mardikanto mengatakan bahwa di Indonesia upaya penanggulangan kemiskinan dewasa ini menjadi sangat penting, hal ini dikarenakan Bank dunia telah mengatakan bahwa kemiskinan absolut di Indonesia 60% penduduknya berada dibawah garis kemiskinan. Maka upaya pemberdayaan masyarakat semakin menjadi kebutuhan dalam setiap upaya pembangunan.¹

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk memampukan desa dalam melakukan tindakan bersama sebagai suatu kesatuan yang melibatkan

¹ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 25.

berbagai pemangku kepentingan di tingkat pemerintah desa, masyarakat desa, maupun pihak lain untuk mendorong partisipasi dan mendayagunakan kemampuan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa, menyusun perencanaan pembangunan yang berpihak pada kelompok miskin, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia di desa.

Menurut Totok Mardikanto, pemberdayaan mengandung arti: 1) perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan; 2) perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan); 3) kemerdekaan dari segala penindasan; 4) terjaminnya keamanan; 5) terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran.

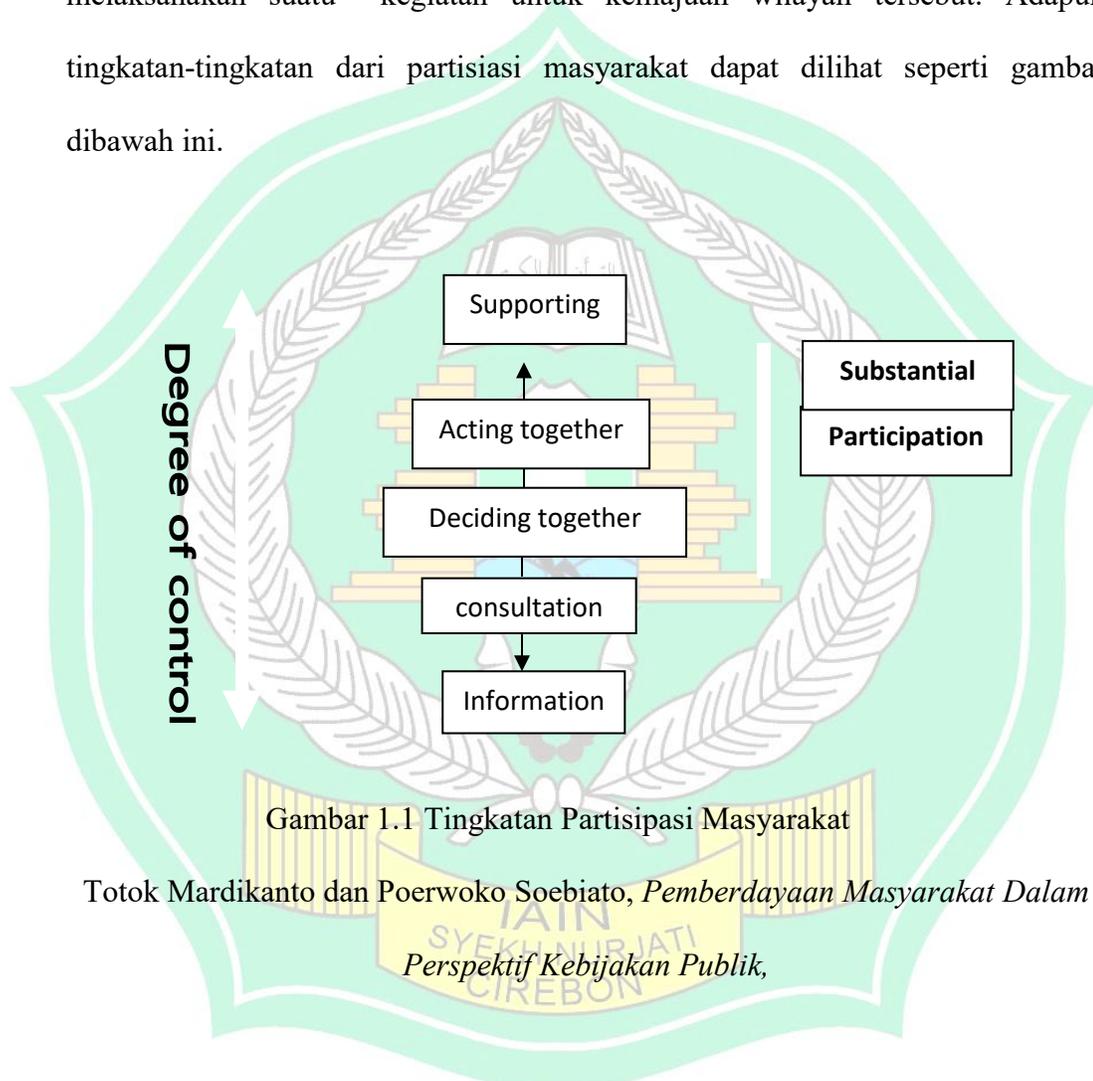
Yang artinya pemberdayaan adalah upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat dan atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi, dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung jawab demi perbaikan kehidupannya.²

Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu: pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Ketiga, dalam proses pembedayaan harus dicegah yang lemah

² Ibid, hlm. 28.

menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan menghadapi yang kuat.³

Pemberdayaan juga disebut sebagai partisipasi masyarakat dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk kemajuan wilayah tersebut. Adapun tingkatan-tingkatan dari partisipasi masyarakat dapat dilihat seperti gambar dibawah ini.



Gambar 1.1 Tingkatan Partisipasi Masyarakat

Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*,

Ada lima tingkatan atau tahapan partisipasi dalam pemberdayaan, yang dijelaskan secara singkat, yaitu:

³ Ibid, hlm. 43-44.

- a) Memberikan informasi (*infomation*), maksudnya masyarakat hanya menjawab pertanyaan penelitian, akan tetapi tidak diberi kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penelitian;
- b) Konsultasi (*consultation*), yakni masyarakat menawarkan pendapat sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan-balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut;
- c) Pengambilan keputusan bersama (*deciding together*) yang berarti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan;
- d) Bertindak bersama (*action together*) yang berarti tidak hanya ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi terlibat dan ikut menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya;
- e) Memberikan dukungan (*supporting*) di mana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik adalah salah satu faktor penentu sukses atau tidaknya suatu wirausaha sosial. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan melakukan berbagai pelatihan untuk menambah kemampuan dan wawasan. Dengan begitu, bukan hanya wirausaha sosial akan terbantu, tapi juga bisa membantu masyarakat dari segi edukasi dan penambahan *skill*. Adanya *trial* dan *error* dalam setiap pelatihan itu hal

biasa apalagi dengan latar belakang pengalaman seseorang yang masih minim. Namun, dengan kegigihan dan pelatihan yang konsisten, masyarakat daerah bisa menjadi sebuah aset SDM bagi perusahaan.

Pendekatan yang dilakukan dalam pemberdayaan desa menggunakan pendekatan partisipatif dengan menjadikan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan dengan memanfaatkan sumberdaya dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat desa.

Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu tugas pemerintah daerah yang harus dijalankan sesuai dengan amanah peraturan perundangan. Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat mencakup aspek yang sangat luas, baik aspek ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan politik.

Kabupaten Kuningan adalah sebuah kabupaten yang terletak di bagian timur Jawa Barat. Kuningan merupakan perlintasan jalan yang menghubungkan Bandung-Majalengka dengan Jawa Tengah. Membahas mengenai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat kuningan merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang tidak terlepas dari masalah kemiskinan.

Tabel 1.1

Presentase Penduduk miskin Menurut Kabupaten 2015-2017

Nama Wilayah	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2015	2016	2017
JAWA BARAT	9.53	8.95	8.71
Bogor	8.96	8.83	8.57
Sukabumi	8.96	8.13	8.04
Cianjur	12.21	11.62	11.41
Bandung	8.00	7.61	7.36
Garut	12.81	11.64	11.27
Tasikmalaya	11.99	11.24	10.84
Ciamis	8.98	8.42	8.20
Kuningan	13.97	13.59	13.27
Cirebon	14.77	13.49	12.97

<http://www.bps.go.id>

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat tahun 2017 angka kemiskinan di Kabupaten Kuningan cukup fantastik, karena mencapai 13,27 persen atau sekitar 141.550 orang.⁴

IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON

⁴ <https://www.bps.go.id>, persentase penduduk miskin menurut kota/kabupaten tahun 2015-2017.

Tabel 1.2

Presentase Penduduk miskin Menurut Provinsi 2014-2017

Provinsi									
	2014		2015		2016		2017		
	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)							
KEP. BANGKA BELITUNG	5.25	5.36	4.97	5.40	4.83	5.22	5.04	5.20	5.30
KEP. RIAU	6.35	6.70	6.40	6.24	5.78	5.98	5.84	6.06	6.13
DKI JAKARTA	3.72	3.92	4.09	3.93	3.61	3.75	3.75	3.77	3.78
JAWA BARAT	9.61	9.44	9.18	9.53	9.57	8.95	8.77	8.71	7.83
JAWA TENGAH	4.44	14.46	13.58	13.58	13.32	13.27	13.19	13.01	12.23
DI YOGYAKARTA	5.03	15	14.55	14.91	13.16	13.34	13.10	13.02	12.36
JAWA TIMUR	2.73	12.42	12.28	12.34	12.28	12.05	11.85	11.77	11.20
BANTEN	5.89	5.35	5.51	5.90	5.75	5.42	5.36	5.45	5.59
BALI	4.49	4.53	4.76	4.74	5.25	4.25	4.15	4.25	4.14

<http://www.bps.go.id>

Pada provinsi Jawa Barat angka kemiskinan berada pada angka 7,83 persen, presentase pada tingkat provinsi Jawa Barat lebih kecil dari pada di Kabupaten Kuningan.⁵



⁵ <https://www.bps.go.id>, persentase penduduk miskin menurut provinsi tahun 2015-2017.



Gambar 1.2 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin, 1999-2017

Sedangkan angka kemiskinan pada tingkat nasional atau di Indonesia ini per September 2017 ini berada pada angka 10,12 persen.⁶

Angka kemiskinan di “Kota Kuda” ini lebih tinggi di banding kemiskinan di tingkat Provinsi Jawa Barat yang hanya 7,83 persen, dan nasional yang tercatat 10,12 persen. Sedangkan pada kabupaten Kuningan mencapai 13,27 persen.

Kelurahan Cipari salah satu Kelurahan di Kabupaten Kuningan tidak terlepas dari masalah kemiskinan, akan tetapi di desa ini pula terdapat banyak potensi yang dapat dikembangkan dan dapat diberdayakan oleh masyarakat sekitarnya, sehingga dapat meningkatkan tingkat kemakmuran masyarakat di desa ini.

⁶ <https://www.bps.go.id>, jumlah dan persentase penduduk miskin 1999-2017.

Dari data yang penulis dapatkan dari pihak kelurahan Cipari, masih terdapat sekitar 387 keluarga miskin di Kelurahan Cipari.⁷ Beberapa potensi yang dimiliki oleh Kelurahan Cipari diantaranya adalah peternakan sapi perah, dimana susu murni yang dihasilkan dapat diolah menjadi berbagai macam produk olahan. Ada pula tempat wisata di kelurahan ini yang apabila dikembangkan bisa menjadi program pemberdayaan masyarakat Kelurahan Cipari dan dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat sekitarnya, terdapat banyak sektor-sektor ekonomi yang dimiliki oleh Kelurahan Cipari ini seperti Koperasi dan lain sebagainya yang akan dibahas dalam penelitian ini. Namun, dalam kenyataannya dengan potensi yang sedemikian rupa masih terdapat beberapa masalah yang terjadi dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya sebagian masyarakat masih kurang peduli akan kelengkapan dokumen izin usaha dan dokumen lain yang menunjang usahanya sehingga masih ada dan sering terdengar keluhan dari warga sekitar. Kemudian belum maksimalnya pengelolaan limbah ternak yang menimbulkan pencemaran lingkungan terutama ekosistem air sungai dan menimbulkan bau busuk yang menyengat.⁸

Pembangunan yang dilakukan oleh daerah-daerah seharusnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, namun kenyataannya masih ada beberapa daerah kaya sumberdaya alam yang masih

⁷ Data Kelurahan Cipari per 24 Februari 2019.

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Sri selaku bagian Kesra (Kesejahteraan Rakyat) pada tanggal 24 Februari 2019.

bergelut dengan kemiskinan. Koperasi merupakan suatu organisasi koperasi, karena itu untuk mencapai tujuan memenuhi kebutuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan para anggotanya koperasi melakukan kegiatan usaha. Pada usaha koperasi, pelayanan kepada anggota menjadi dasar pertimbangan utama dari kegiatan usahanya. Orientasi koperasi tentang keuntungan atau laba dalam kegiatan usahanya sama sekali berbeda dengan usaha orang-perorangan atau badan-badan bukan koperasi. Dorongan untuk memperoleh laba setinggi-tingginya tidak berlaku pada koperasi. Hasil usaha memang sangat diperlukan untuk membiayai kegiatan usaha, memberi jasa kepada anggotanya, memupuk cadangan dan memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya. Namun, semua itu dikelola secara wajar.⁹

Untuk menghindari memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya seperti dalam ekonomi kapitalis, maka perlu adanya suatu akad yang dapat menghindari hal tersebut. Dalam hal ini ekonomi syariah menawarkan program pembiayaan *muḍārabah*, dalam akad ini tidak ada sistem bunga tetapi yang ada sistem bagi hasil. Bagi hasil adalah bentuk *return* dari kontrak investasi, yakni termasuk dalam *natural uncertainty contract*. Yang kemudian selengkapnya akan dibahas dalam penelitian ini.

B. Batasan Masalah Penelitian

⁹ Ninik Widiyanti dan Y.W. Sunindhia, *Koperasi dan perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 194.

Adapun penelitian ini termasuk dalam wilayah kajian Ekonomi Pembangunan. Lebih spesifik penelitian ini membahas tentang pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Cipari Kabupaten Kuningan.

Dalam penelitian ini, pada dasarnya ada banyak hal yang dapat diangkat untuk dikaji lebih dalam lagi, namun penulis perlu membatasi masalah yang lebih terperinci dan jelas agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu meluas. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini membahas tentang kesejahteraan masyarakat Kelurahan Cipari, dimana jumlah KK (Kartu Keluarga) sebanyak 674 KK. Di mana 318 KK memiliki sapi perah dengan jumlah keseluruhan 1778 sapi. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa sebagian besar penghasilan ekonomi masyarakat di dapat dari sapi perah. Dan yang mendapat manfaat dari sapi perah, selain dari keluarga pemilik sapi keluarga lain yang tidak memiliki sapi, juga dapat merasakan manfaatnya dengan cara bekerja sebagai buruh pemerah susu sapi perah dan warung-warung kecil yang memasarkan olahan susu sapi perah.
2. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Cipari Kabupaten Kuningan melalui Koperasi Serba Usaha Karya Nugraha Jaya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran KSU Karya Nugraha Jaya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kelurahan Cipari?

2. Bagaimana penerapan program *mudārabah* pada KSU Karya Nugraha Jaya di Kelurahan Cipari?
3. Apakah penerapan program *mudārabah* dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kelurahan Cipari telah sesuai?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan peran KSU Karya Nugraha Jaya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kelurahan Cipari.
- b. Untuk mendeskripsikan penerapan program *mudārabah* pada KSU Karya Nugraha Jaya di Kelurahan Cipari.
- c. Untuk mendeskripsikan kesesuaian penerapan program *mudārabah* dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kelurahan Cipari.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai suatu pengetahuan yang bersifat praktis tentang upaya penanggulangan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui suatu lembaga ekonomi yang terdapat pada daerah tersebut.

- b. Manfaat Akademik

Sebagai perwujudan tri dharma perguruan tinggi IAIN Syekh Nurjati Cirebon diharapkan dapat menambah referensi dalam bidang

ekonomi pembangunan dalam pengentasan kemiskinan sekaligus sebagai sumbang pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang.

E. Kajian Terdahulu

Hasil penelitian dari Chairul Nizar, Abubakar Hamzah dan Sofyan Syahnur¹⁰ (2013) dengan judul *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Hubungannya terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia* menunjukkan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi (PDB) dan estimasi pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan secara langsung sangat kecil namun hubungannya negatif dan signifikan. Oleh karenanya pemerintah hendaknya tidak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja akan tetapi lebih dari pada itu pertumbuhan ekonomi harus berkualitas dan berkeadilan yaitu pertumbuhan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pradeep Agarwal¹¹ (2008) dalam penelitiannya *Economic Growth and Poverty Reduction: Evidence from Kazakhstan* menunjukkan bahwa provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mencapai penurunan yang cepat

¹⁰ Chairul Nizar dkk, *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Hubungannya terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia*, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2013).

¹¹ Pradeep Agarwal, *Economic Growth and Poverty Reduction: Evidence from Kazakhstan*, 2008, <https://scholar.google.co.id>.

dalam kemiskinan. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi menyebabkan meningkatnya lapangan kerja dan upah.

Kwaku D. Kessey¹² (2013) dalam penelitiannya yang berjudul *Global Poverty Reduction Policy and Implementation Strategies at Local Level, Integrated Planning Options and Challenges in a Developing Country, Ghana* menunjukkan bahwa sector ekonomi, keuangan, kelembagaan dan sosial mempunyai kontribusi terbesar pada lambatnya proses pengentasan kemiskinan sehingga saat MDGs yang terkait dengan pengentasan kemiskinan pada tahun 2015 tidak tercapai. Strategi untuk mencapai target terkait pengurangan kemiskinan adalah dengan memperkuat hubungan antar sektor ekonomi seperti pertanian, industri dan jasa.

Hasil penelitian dari Kristin Komives dan Geske Dijkstra¹³ (2011) yang berjudul *the Legacy of the Poverty Reduction Strategy Processes in Latin America: Introduction and Overview* menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan yang ada tidak efektif. Diperlukan strategi ja dampaknya akan lebih luas ngka panjang yang didukung oleh program pengentasan kemiskinan yang lebih fokus pada daerah-daerah tertentu.

¹² Kwaku D. Kessey, *Global Poverty Reduction Policy and Implementation Strategies at Local Level, Integrated Planning Options and Challenges in a Developing Country, Ghana*, Kumasi: Departement of Planning of Science and Technology, 2013), www.meritresearchjournals.org.

¹³ Kristin Komives dan Geske Dijkstra, *the Legacy of the Poverty Reduction Strategy Processes in Latin America: Introduction and Overview*, The European Journal of Development Research, 2011, <https://econpapers.repec.org>.

Hasil penelitian dari P. Eko Prasetyo dan Siti Maisaroh¹⁴ (2009) yang berjudul *Model Strategi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan dengan studi kasus di daerah lereng pegunungan di wilayah Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta* menunjukkan bahwa pemberdayaan potensi ekonomi lokal yang produktif dan kreatif merupakan model strategi dasar kebijakan pemberdayaan yang dapat dilakukan dalam jangka pendek. Namun jika hasilnya dikembangkan secara berkelanjutan dampaknya akan lebih luas dalam jangka panjang dan bermanfaat untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

Isaac Azikiwe Agholor dan Ajuruchukwu Obi¹⁵ (2013) dalam penelitiannya yang berjudul *the Storm of Poverty Reduction Strategy in Africa: Chronology of Experiences from South Africa* menunjukkan bahwa salah satu strategi untuk mengurangi kemiskinan di Africa Selatan adalah melalui pendidikan yaitu dengan membebaskan biaya untuk beberapa sekolah yang ditunjuk.

Adenutsi, Deodat E.¹⁶ (2009) dalam jurnalnya yang berjudul *Entrepreneurship, job creation, income empowerment and poverty reduction in low-income economies* berpendapat bahwa kewirausahaan adalah

¹⁴ P. Eko Prasetyo dan Siti Maisaroh, *Model Strategi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan dengan studi kasus di daerah lereng pegunungan di wilayah Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul*, 2009, <https://scholar.google.co.id>.

¹⁵ Isaac Azikiwe Agholor dan Ajuruchukwu Obi, *the Storm of Poverty Reduction Strategy in Africa: Chronology of Experiences from South Africa*, <https://www.researchgate.net>, 2013.

¹⁶ Adenutsi, Deodat E, *Entrepreneurship, job creation, income empowerment and poverty reduction in low-income economies*, <https://mpira.uni-muenchen.de/id/eprint/29569>, 2009.

katalis untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan melalui penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan pendapatan dan pengurangan kemiskinan dalam ekonomi. Namun, untuk memperluas budaya pemikiran kewirausahaan dan mempromosikan kewirausahaan dalam ekonomi, sangat penting untuk menciptakan peluang kerja yang menghasilkan pendapatan tinggi dan mengurangi kemiskinan melalui kewirausahaan, ada kebutuhan untuk langkah-langkah kebijakan dan program intervensi yang penting dan konsisten dengan tujuan peningkatan kesejahteraan.

John N. N. Ugoani¹⁷ (2017) dalam jurnalnya yang berjudul *Examination of the Impact of National Economic Empowerment and Development Strategy on Poverty Reduction in Nigeria* mengatakan bahwa tingkat kemiskinan rata-rata sekitar 68,40 persen adalah indikasi yang jelas bahwa mayoritas warga Nigeria tidur di bawah garis kemiskinan meskipun ada program pengentasan kemiskinan. Metode penelitian eksplorasi digunakan untuk penelitian ini dalam upaya untuk mengeksplorasi dampak kebutuhan sebagai strategi pengurangan kemiskinan di Nigeria. Melalui analisis statistik, ditemukan bahwa kebutuhan belum membuat dampak positif yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan di Nigeria.

Tien Yustini¹⁸ (2018) dalam penelitiannya yang berjudul

¹⁷ John N. N. Ugoani, *Examination of the Impact of National Economic Empowerment and Development Strategy on Poverty Reduction in Nigeria*, <https://ideas.repec.org>, 2017.

¹⁸ Tien Yustini, *Effectiveness of poverty reduction Program with Value Added Creation in Agribusiness Sector and Formulation of Strategic Plan and Policies*, <https://ideas.repec.org>, 2018.

untuk mengukur efektivitas program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah, dilakukan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menggambarkan program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan, dilanjutkan dan akan dilakukan oleh pemerintah bersama dengan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya dianalisis masalah atau hambatan yang dihadapi dalam implementasi, perumusan dan kembangkan model pemberdayaan masyarakat yang dianggap cukup efektif untuk mengatasi kemiskinan. Analisis efektivitas dihitung dengan membandingkan target yang direncanakan dengan hasil yang dicapai.

Tibyan¹⁹. *Analisis Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sragen*. Universitas Sebelas Maret. 2010. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) pada 1) peningkatan produktivitas, 2) jumlah tenaga kerja dan 3) penghasilan usaha Kelompok Swadana Mandiri (KSM) penerima bantuan kredit usaha ekonomi produktif di Kota Sragen. Hasil penelitian menunjukkan 1) Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dapat meningkatkan produktivitas, 2) jumlah tenaga kerja, dan penghasilan KSM yang menerima pemberian bantuan kredit usaha ekonomi produktif di Kota Sragen.

¹⁹ Tibyan, *Analisis Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sragen*, Universitas Sebelas Maret, 2010.

Ahmad Taufiq, Dewi Erowati dan Wijayanto²⁰. *Upaya Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Lokal (Belajar dari Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak)*. 2010. Program P2KP (Urban Poverty Project) salah satu program untuk mengatasi masalah kemiskinan di perkotaan. Program P2KP Pengentasan kemiskinan yang tidak stabil di daerah perkotaan berdasarkan tiga pilar pemberdayaan. Pertama, pemberdayaan fisik; Kedua, pemberdayaan ekonomi; ketiga, sosial Pemberdayaan. Studi ini menemukan bahwa program P2KP berhasil dilaksanakan dipemberdayaan fisik dan sosial.

Waskitho²¹. *Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP)*. 2009. “Gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan”, yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal. (Dikutip dari : Buku Pedoman Umum P2KP-3, Edisi Oktober 2005). Permasalahan kemiskinan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk ditangani. Khususnya di wilayah perkotaan, salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan

²⁰ Ahmad Taufiq dkk, *Upaya Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Lokal (Belajar dari Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak)*, eprints.undip.ac.id, 2010.

²¹ Waskitho, *Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP)*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2009).

kualitas perumahan dan permukiman yang jauh dibawah standar kelayakan, serta mata pencaharian yang tidak menentu.

Asti Destiana, D. Sryatman, Nur Eka Setiowati²². *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Manis Kidul Dalam Menunjang Pendidikan Formal Di Objek Wisata Cibulan Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan*. IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 2016. Pembangunan dalam bidang ekonomi yang dilaksanakan di desa dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan. Usaha pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi merupakan bentuk kemandirian dalam mengatasi permasalahan mereka melalui kreatifitas untuk meningkatkan kualitas hidup. Objek Wisata Cibulan dapat memberdayakan penduduk desa Manis Kidul. Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi dengan pendekatan kualitatif yang diperoleh datanya dengan tehnik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian diperoleh bahwa (1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat di objek wisata dilakukan dengan pendekatan partisipasi dalam usaha ekonomi, baik secara individu maupun kelompok yang berupa layanan usaha wisata. Bentuk kegiatan perekonomian sebagai sumber pendapatan masyarakat di objek wisata ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. (2) Adanya daya tarik objek wisata di Cibulan dalam bentuk wisata alam dan wisata budaya. Pemberdayaan ekonomi di objek wisata Cibulan menciptakan aktivitas usaha yang memenuhi kebutuhan wisata alam dan budaya tersebut, yang menjadi

²² Asti Destiana dkk, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Manis Kidul Dalam Menunjang Pendidikan Formal Di Objek Wisata Cibulan Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016.

sumber penghasilan sebagian masyarakat. (3) Peran masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi dengan dibukanya usaha ekonomi dan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang kegiatan wisata seperti warung-warung penjual makan sampai restoran sarana ibadah, toilet, tempat parkir dan lainnya. Usaha layanan pariwisata ini sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi yang pada akhirnya dapat menunjang pendidikan formal. (4) Peran pemerintah desa di objek wisata Cibulan dalam bentuk pemberian fasilitas secara gratis terhadap pelaku ekonomi dan tidak ada pajak. Bentuk dukungan pemerintah daerah tersebut, berdampak pada peningkatan penghasilan yang makin layak dan sejahtera, dan akhirnya dapat mendukung partisipasi pendidikan formal masyarakat.

Ita Ulumiyah, Abdul Juli Andi Gani, Lely Indah Mindarti²³. *Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)*. Universitas Brawijaya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peran Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Sumberpasir telah mampu

²³ Ita Ulumiyah dkk, *Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)*. Universitas Brawijaya. Vol. 1, No. 5, 890-899.

memberdayakan masyarakat melalui beberapa program-program pemberdayaan yaitu: pertama pengaktifan kelembagaan, kedua peningkatan peran serta masyarakat dengan kegiatan pelaksanaan kerja bakti, perlombaan desa, musrenbang desa serta pembangunan Fisik, ketiga peningkatan ekonomi produktif dengan kegiatan pemberian pelatihan pande besi dan pelatihan bordir. Akan tetapi dalam melaksanakan upaya Pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa Sumberpasir mengalami kendala-kendala diantaranya partisipasi masyarakat yang kurang, budaya malas serta kurangnya fasilitas yang tersedia dalam mendukung kegiatan pemberdayaan.

F. Kerangka Pemikiran

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Konsepsi kemiskinan yang bersifat multidimensional ini kiranya lebih tepat juga digunakan sebagai pisau analisis dalam mendefinisikan kemiskinan dan merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Adapun dimensi kemiskinan menurut Edi Suharto²⁴ menyangkut beberapa aspek-aspek sebagai berikut :

Dimensi kemiskinan terdiri dari beberapa aspek

²⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Rakyat Pemberdayaan Rakyat*, (Bandung :PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 133.

1. Aspek ekonomi, secara ekonomi kemiskinan dapat di definisikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat di gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang
2. Aspek Politik, Kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (*power*). Kekuasaan dalam pengertian ini mencakup tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumberdaya.

Ada tiga pertanyaan mendasar terhadap pertanyaan ini, yaitu:

- a. Bagaimana orang dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada dalam masyarakat.
 - b. Bagaimana orang turut ambil bagian dalam dalam pembuatan keputusan penggunaan sumber dana yang tersedia.
 - c. Bagaimana kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan kegiatan kemasyarakatan.
3. Aspek sosial-psikologis, Kemiskinan secara sosial-psikologis menunjukkan pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas.

Kemiskinan pada hakekatnya merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia ada di muka bumi ini. Sampai saat ini belum juga ditemukan suatu rumusan maupun resep (formula) penanganan kemiskinan yang di anggap paling jitu, dan tidak ada konsep tunggal tentang kemiskinan. Strategi

penanggulangan kemiskinan masih harus terus menerus selalu dikembangkan. Bila dipetakan, literatur mengenai kebijakan sosial dan pekerjaan sosial menurut Edi Suharto²⁵, menunjukkan terdapat dua pradigma seperti tabel berikut:

Tabel 1.3

Paradigma Edi Suharto²⁶

PRADIGMA	Neo-Liberal	Demokrasi-Sosial
Landasan Teoritis	Individual	Struktural
Konsep dan indicator kemiskinan	Kemiskinan Absolut	Kemiskinan Relatif
Penyebab Kemiskinan	Kelemahan dan pilihan pilihan individu; lemahnya pengaturan pendapatan; lemahnya kepribadian (malas, pasrah, bodoh).	Ketimpangan struktur ekonomi dan politik; ketidakadilan social
Strategi penanggulangan kemiskinan	→ Penyaluran pendapatan terhadap orang miskin secara selektif. → Memberi pelatihan keterampilan pengelolaan keuangan melalui inisiatif masyarakat dan LSM.	→ Penyaluran pendapatan secara universal → Perubahan fundamental dalam pola-pola pendistribusian pendapatan melalui Negara dan kebijakan sosial.

Edi Suharto, *Membangun Masyarakat dalam Pemberdayaan Rakyat*

²⁵ Ibid, hlm. 132.

²⁶ Ibid, hlm. 130.

Pemberantasan kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang sangat kompleks dan mempunyai dimensi tantangan lokal, nasional maupun global. Upaya mengatasi masalah kemiskinan karenanya tak bisa dilepaskan dari strategi nasional untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di suatu negara. Ada tiga persyaratan pokok bagi tercapainya pembangunan berkelanjutan:

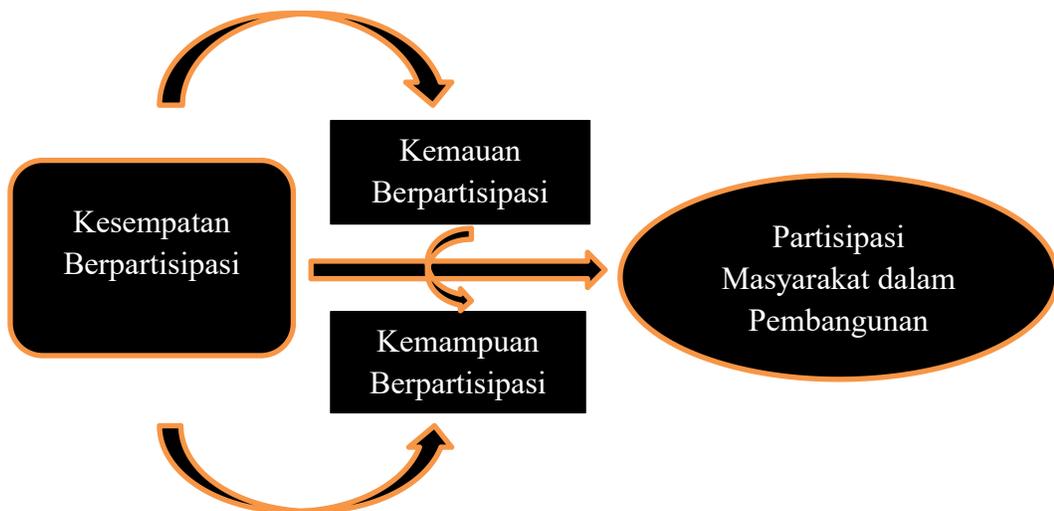
- a. Pengentasan kemiskinan,
- b. Perubahan pola konsumsi dan produksi yang tidak menunjang keberlanjutan,
- c. Perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari.

Selain itu program pengentasan kemiskinan juga tak mungkin berjalan tanpa adanya tata-kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagai dasar bagi terlaksananya pembangunan berkelanjutan di manapun, termasuk dan terutama di Indonesia.

Kemiskinan yang timbul di tengah-tengah masyarakat adalah hasil dari proses turun-temurun atau kemiskinan yang telah diwariskan dari beberapa generasi ke generasi sehingga, budaya kemiskinan terbentuk dan telah melekat dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Dan yang paling penting tidak melihat budaya itu sendiri suatu sebab atau sebagai suatu akibat, melainkan bagaimana cara merubah budaya yang ada melalui program-program atau kebijakan-kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan.

Program penanggulangan adalah suatu jawaban dan solusi untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan. Banyak program mengenai penanggulangan kemiskinan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Tujuan umumnya adalah untuk meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.



Gambar 1.3 Syarat Tumbuh dan Berkembangnya Partisipasi Masyarakat

Dalam kenyataan, banyak program pembangunan yang kurang memperoleh partisipasi masyarakat karena kurangnya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Di lain pihak, juga sering dirasakan tentang kurangnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat mengenai kapan dan dalam bentuk apa mereka dapat atau dituntut untuk berpartisipasi.

Perlu disadari bahwa adanya kesempatan-kesempatan yang disediakan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat tidak akan banyak berarti jika masyarakat tidak memiliki kemampuan, kemampuan disini adalah:

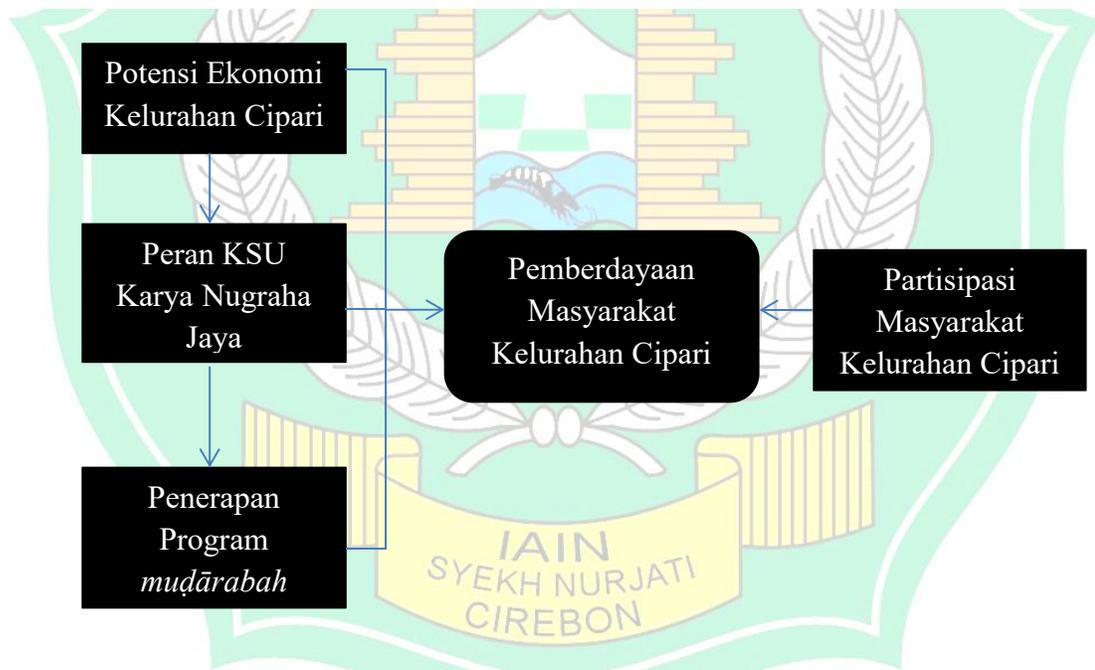
- a. Kemampuan untuk menemukan dan memahami kesempatan-kesempatan untuk membangun, atau pengetahuan tentang peluang untuk memperbaiki mutu hidupnya.
- b. Kemampuan untuk melaksanakan pembangunan, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki.
- c. Kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan sumberdaya dan kesempatan lain yang tersedia.

Kemauan untuk berpartisipasi, utamanya ditentukan oleh sikap mental yang dimiliki masyarakat untuk membangun atau memperbaiki kehidupannya, yang menyangkut:

- a. Sikap untuk meninggalkan nilai-nilai yang menghambat pembangunan
- b. Sikap terhadap penguasa atau pelaksana pembangunan pada umumnya
- c. Sikap untuk selalu ingin memperbaiki mutu hidup dan tidak cepat puas diri

- d. Sikap kebersamaan untuk dapat memecahkan masalah, dan tercapainya tujuan pembangunan
- e. Sikap kemandirian atau percaya diri atas kemampuannya untuk memperbaiki mutu hidup.

Di kelurahan Cipari kabupaten kuningan merupakan salah satu penghasil susu sapi perah terbanyak no. 3 di Jawa Barat²⁷. Dan di kelurahan Cipari pula terdapat suatu lembaga ekonomi yang memfasilitasi dan menampung susu sapi perah dari setiap anggotanya atau dengan kata lain mengelolanya.



Gambar 1.4 Kerangka Pemikiran

²⁷ Hasil wawancara dengan bapak Unang selaku wakil ketua 1 KSU Karya Nugraha Jaya pada tanggal 20 April 2019.

Pada gambar ini, penulis mencoba untuk mendeskripsikan mengenai alur penelitian yang akan dilakukan. Pertama-tama dalam penelitian ini akan digambarkan tentang potensi ekonomi yang dimiliki oleh kelurahan Cipari, baik dari segi pertanian, perkebunan, perdagangan, pariwisata dan lain sebagainya. Kemudian dari potensi-potensi tersebut, lebih dikerucutkan lagi dimana potensi ekonomi tersebut yang lebih dominan di kelurahan Cipari. Dari potensi ekonomi yang lebih dominan itulah akan dikembangkan melalui suatu lembaga ekonomi, dalam hal ini melalui KSU Karya Nugraha Jaya. Dan melalui KSU Karya Nugraha Jaya inilah kemudian pemberdayaan masyarakat ekonomi di Kelurahan Cipari akan dikembangkan. Kemudian peneliti juga akan membahas mengenai penerapan program *muḍārabah* pada KSU Karya Nugraha Jaya. Dan dari skema ini akan terlihat sejauh mana masyarakat Kelurahan Cipari ikut berpartisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat.

G. Metode Penelitian

Secara umum metode dan pendekatan penelitian di bagi menjadi dua, yakni penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositifisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (lawan dari eksperimenn) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber dan data dilakukan secara *purposive* atau *snowbal*, teknik pengumpulan data dilakukan

dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.²⁸

1. Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Data memegang peranan penting dalam pelaksanaan penelitian. Pemecahan suatu permasalahan dalam penelitian sangat tergantung dari keakuratan data yang diperoleh. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau uraian. Data ini mempunyai peranan untuk menjelaskan secara deskriptif suatu masalah.²⁹

Berdasarkan sumbernya data dapat digolongkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.³⁰
- 2) Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli.³¹

²⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta), 2009), hlm. 15.

²⁹ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 57.

³⁰ Loc.cit.

³¹ Ibid, hlm. 58.

Pada penelitian ini data yang akan digunakan oleh peneliti adalah berupa data primer yakni data yang diperoleh oleh peneliti dari responden pada saat wawancara, dan selain itu peneliti menggunakan data sekunder yakni data yang diperoleh dari data-data perusahaan.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang lebih spesifik karena tidak hanya terbatas pada orang, tetapi pada objek-objek yang diteliti.³² Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi berperan serta (*participant observation*) yaitu peneliti terlibat langsung dengan apa yang dirasakan oleh sumber data sehingga data lebih lengkap, tajam, serta mengetahui tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Peneliti dalam mengumpulkan data ikut observasi partisipatif dalam beberapa kegiatan, tetapi tidak semuanya.

b. Wawancara

Menurut Prof. Dr. S. Nasution wawancara (*interview*) adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi, semacam percakapan yang bertujuan

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 145.

memperoleh informasi. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.³³ Dalam hal ini peneliti bertanya langsung kepada responden atau informan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat.

Estenberg dalam Sugiyono³⁴ (2010: 233) mengemukakan tiga jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semistruktur, dan tidak terstruktur.

1) Wawancara terstruktur (*structured interview*) digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara pewawancara telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya. Dengan wawancara terstruktur ini pula, peneliti dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data. Tentunya, pengumpul data tersebut harus diberi *training* agar mempunyai kemampuan yang sama.

³³ Moh. Pabundu Tika, Op.cit., hlm. 62.

³⁴ Sugiyono, Op.cit., hlm. 233.

- 2) Wawancara semistruktur (*semistruktur interview*) sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview* yang pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan pihak yang diajak wawancara diminta pendapatnya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.
- 3) Wawancara tidak berstruktur (*unstructured interview*) merupakan wawancara yang bebas dan peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.
- 4) Wawancara tidak berstruktur atau terbuka sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau malahan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang subjek yang diteliti. Pada penelitian pendahuluan, peneliti berusaha memperoleh informasi awal tentang berbagai isu atau permasalahan yang ada, sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan atau variabel apa yang harus diteliti.

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan wawancara semistruktur dan wawancara terstruktur, dimana pertama-tama penulis akan mewawancarai beberapa orang secara bebas dari pihak aparat desa

maupun masyarakat desa. Hal ini dilakukan untuk menemukan masalah lebih mendalam agar masalah akan terlihat lebih jelas.

Kemudian setelah masalah yang akan diteliti telah terlihat jelas, penulis akan melakukan wawancara terstruktur, dalam melakukan wawancara pewawancara akan menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

Sebelum mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber, peneliti akan memaparkan beberapa indikator dari kedua variabel penelitian yakni penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Indikator dari variabel-variabel ini akan menjadi rujukan bagi penulis untuk mewawancarai narasumber.

Setiap permasalahan timbul pasti karena ada faktor yang mengiringinya yang menyebabkan timbulnya sebuah permasalahan, begitu juga dengan masalah kemiskinan yang dihadapi oleh negara Indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan menurut Hartomo dan Aziz dalam Dadan Hudyana³⁵ yaitu :

- 1) Pendidikan yang Terlampau Rendah, Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan

³⁵ Hartomo dan Aziz dalam Dadan Hudyana, *Kemiskinan di Ibukota*, (Jakarta: Pustaka Media, 2009), hlm. 28-29.

pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja.

- 2) Malas Bekerja, Adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja.
- 3) Keterbatasan Sumber Alam, Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumberdaya alamnya miskin.
- 4) Terbatasnya Lapangan Kerja, Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan.
- 5) Keterbatasan Modal, Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan.
- 6) Beban Keluarga, Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak

anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi.

Pekerja masyarakat manapun atau siapa pun yang terkait dengan program pengembangan masyarakat harus memperhatikan keenam dimensi itu dan tujuan tersebut harus memaksimalkan pengembangan pada seluruh dimensi itu. Schuler, Hashemi dan Riley dalam (Edi Suharto;2008) mengembangkan beberapa indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai empowerment index atau indeks pemberdayaan:

- 1) Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
- 2) Kemampuan membeli komoditas 'kecil': kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, sampo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.

- 3) Kemampuan membeli komoditas ‘besar’: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator di atas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri
- 4) Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ditenak, memperoleh kredit usaha.
- 5) Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja di luar rumah.
- 6) Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.

- 7) Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap 'berdaya' jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes.

Pertanyaan akan peneliti ajukan kepada narasumber atau *key informan* pada saat wawancara berlangsung. Pada penelitian kali ini bertema tentang pemberdayaan masyarakat dan peran KSU Karya Nugraha Jaya, tentu saja yang akan menjadi *key informan* dalam penelitian ini adalah pihak kelurahan yang mengetahui secara detail potensi serta permasalahan yang terjadi di kelurahan Cipari dan Pihak KSU Karya Nugraha Jaya termasuk para anggotanya.

Lincoln dan Guba dalam Sugiyono³⁶ mengemukakan tujuh langkah dalam penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, yaitu:

- 1) Menetapkan kepada siapa wawancara itu dilakukan;
- 2) Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan;
- 3) Mengawali atau membuka alur wawancara;
- 4) Melangsungkan alur wawancara;
- 5) Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya;
- 6) Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan;

³⁶ Sugiyono, Op.cit., hlm. 235.

7) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang diperoleh.

c. Studi Kepustakaan

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari kantor, buku (kepuustakaan), atau pihak-pihak lain yang memberikan data yang erat kaitannya dengan objek dan tujuan penelitian.³⁷ Studi ini dilakukan untuk mencari data melalui buku-buku sebagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian guna mendukung objektivitas data hasil penelitian. Kepustakaan ini merupakan data sekunder yang merupakan data pelengkap dari data primer.

Selain mendapatkan data-data dari hasil wawancara dari pihak Kelurahan Cipari, dan juga masyarakat desa serta lembaga-lembaga yang terdapat di kelurahan tersebut, peneliti juga akan mengumpulkan data-data melalui studi kepustakaan berupa buku-buku yang bersangkutan, jurnal-jurnal, serta penelitian terdahulu yang serupa sebagai rujukan atau referensi.

d. Dokumentasi

Arikunto menjelaskan bahwa metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.³⁸ Dalam

³⁷ Moh. Pabundu Tika, Op.cit., hlm. 64.

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 206.

penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari arsip Kelurahan Cipari Kabupaten Kuningan dan gambar yang diambil pada saat penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data bersifat induktif. Karena dalam penelitian kualitatif bukan untuk menguji hipotesis, melainkan bersifat untuk membangun hipotesis. Peneliti mencari data atau bukti untuk mencari abstraksi yang disusun secara khusus atas dasar data yang telah terkumpul dan dikelompokkan bersama-sama melalui pengumpulan data selama proses kerja di lokasi penelitian.³⁹

Proses analisis data menurut Miles dan Humberman yang dikutip oleh Imam Gunawan mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu :

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data merupakan kegiatan, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Temuan yang dipandang asing, tidak dikenal, dan belum memiliki pola, maka hal itulah yang dijadikan perhatian karena penelitian kualitatif bertujuan

³⁹ Husein Umar, *Desain penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 5.

mencari pola dan makna yang tersembunyi dibalik pola dan data yang tampak.

b. Paparan Data (*Data Display*)

Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verifying*)

Penarikan simpulan hasil merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.⁴⁰

4. Pengecekan Keabsahan Data

Salah satu cara paling penting dan mudah dalam menguji validitas atau keabsahan data penelitian kualitatif adalah dengan melakukan triangulasi. Triangulasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memeriksa dan menetapkan validitas dengan menganalisa berbagai perspektif.

⁴⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2015), hl.m. 210.

Dalam pelaksanaan dari langkah pengujian keabsahan ini akan memanfaatkan peneliti, sumber, metode, dan teori.⁴¹

a. Triangulasi Kejujuran Peneliti

Cara ini dilakukan untuk menguji kejujuran, subjektivitas, dan kemampuan merekam data oleh peneliti di lapangan. Dalam penelitian, peneliti sering kali sadar atau tanpa sadar melakukan tindakan-tindakan yang merusak kejujurannya ketika pengumpulan data, atau terlalu melepaskan subjektivitasnya bahkan tanpa kontrol, ia melakukan rekaman-rekaman yang salah terhadap data di lapangan. Melihat kemungkinan-kemungkinan ini, maka perlu dilakukan triangulasi terhadap peneliti, yaitu dengan meminta bantuan peneliti lain melakukan pengecekan langsung, wawancara ulang, serta merekam data yang sama di lapangan. Hal ini adalah sama dengan proses verifikasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan oleh seorang peneliti.

b. Triangulasi dengan Sumber Data

Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa

⁴¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grop, 2012), hlm. 264-265.

yang dikatakan secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintahan, (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Hasil dari perbandingan yang diharapkan adalah berupa kesamaan atau alasan-alasan terjadinya perbedaan.

c. Triangulasi dengan Metode

Mengacu pendapat Patton dengan menggunakan strategi; (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, (2) pengecekan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode *interview* sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika di-*interview*. Begitu pula teknik ini dilakukan untuk menguji sumber data, apakah sumber data ketika di-*interview* dan diobservasi akan memberikan informasi yang sama atau berbeda. Apa bila berbeda maka penelliti harus menjelaskan perbedaan itu, tujuannya adalah untuk mencari kesamaan data dengan metode yang berbeda.

d. Triangulasi dengan Teori

Dilakukan dengan menguraikan pola, hubungan dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari tema atau penjelasan pembanding. Secara induktif dilakukan dengan menyertakan usaha pencarian cara lain untuk mengorganisasikan data yang dilakukan dengan jalan memikirkan kemungkinan logis dengan melihat apakah kemungkinan-kemungkinan ini dapat ditunjang dengan data.

Dari keempat macam triangulasi tersebut, penulis akan menggunakan triangulasi dengan sumber data dan triangulasi dengan teori. Di mana peneliti akan memverifikasi hasil penelitian dengan mencocokkan hasil data yang diperoleh di lapangan atau hasil wawancara dengan narasumber dengan teori-teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab yaitu latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II KAJIAN PUSTAKA: Dalam bab ini diuraikan tentang kajian teori koperasi, *mudārabah*, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III KONDISI OBYEKTIF LAPANGAN: Bab tiga menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, yakni potensi ekonomi Kelurahan Cipari, kondisi KSU Karya Nugraha Jaya dari mulai sejarah hingga program kerjanya.

BAB IV HASIL PENELITIAN: Bab ini berisikan jawaban dari pertanyaan penelitian yang berada pada bab 1 yang kemudian dijawab pada bab ini dengan menggunakan data dan analisis data sesuai dengan yang terdapat pada penelitian ini. Pada bab ini dibahas tentang potensi ekonomi masyarakat Kelurahan Cipari dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, peran KSU Karya Nugraha Jaya terhadap pemberdayaan ekonomi Kelurahan Cipari, peluang dan penerapan akad *mudārabah* pada transaksi pembiayaan KSU Karya Nugraha Jaya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN: Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran dari hasil penelitian maupun saran untuk penelitian selanjutnya.